

ENVIRONMENTALISM DAN GREEN POLITICS: PEMBAHASAN TEORETIS

Yeni Sri Lestari, S.IP., M.Soc.Sc

Dosen Tetap Sosiologi, FISIP, Universitas Teuku Umar

Email: yenilestari24@yahoo.com

Abstract

This article discusses the theoretical study of the motion of environmentalism and its relationship to green politics. Discussion about both of these theories is very important for the study of social and political current that has been overshadowed by the phenomenon of environmentalism movement is growing in many countries which are then contribute ideas in political thinking which is known as green politics. However, movements of change by a group of green politics in many countries are often not as active environmentalism movement that consists of classes of non-party. Based on this, the issue will be reviewed in the discussion of this article is whether the definition of environmentalism? what about the initial formation of environmentalism? what is the link between environmentalism movemental with green politics? What are the benefits of the establishment of green politics?. This article studies found that environmentalism is a major contributor to its form factor green ideology politics in many countries such as in Western Europe, USA and Asia. This is due to the important role of the authorities who come from the political parties to realize the agenda of environmentalism movement into state regulations and decisions that bind all citizens therein. At the end of the analysis, this article will explain that the movement of environmentalism plays an important role in the prevention of greed group of rulers and the interests of the global economy (capitalism and neo-liberalism) the limited resources and contribute greatly to its form of thinking green politics focused and commitment to against the establishment the new governance system that is more wise in managing the global environment.

Keywords: *Environmentalism, green politics,*

1. PENDAHULUAN

Gerakan *environmentalism* dan *green politics* merupakan fenomena menarik dalam kajian sosial politik saat ini karena kedua-duanya saling berkaitan. Hal ini dikarenakan, kedua-dua pemikiran tersebut dapat melahirkan rezim pemerintahan yang arif terhadap permasalahan lingkungan atau dapat melahirkan rezim pemerintahan yang lebih serakah. Pelbagai fenomena alam telah membuktikan, bahwa bencana alam yang terjadi tidak hanya kehendak alam semata melainkan semakin berkembangnya campur tangan manusia yang begitu serakah dalam mengeksploitasi lingkungan hidup yang bersembunyi dibelakang agenda pembangunan negara yang mengejar kepentingan kapitalisme dan ekonomi global (pembangunan negara).

Hal ini dapat dilihat dalam kasus Amerika Serikat yang mengeluarkan peraturan seperti *clean water act*, *clean air act*, *endangered species act* & *national environmental policy act*. Inggris yang mengeluarkan kebijakan tentang pengendalian asap, pencemaran air dan gerakan sanitasi. Selain itu, di China melalui Departemen Ilmu dan Teknologi China beserta Komisi Uni Eropa menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama NZEC (*Near Zero Emission Coal*) dan Teknologi Pembangkit Listrik melalui teknologi CCS (*Carbon Dioxide Capture and Stronge*) pada Konverensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa-China pada Desember 2005. Hal ini merupakan contoh nyata dari usaha pemerintah secara arif untuk melakukan pembangunan negara tanpa mencederai lingkungan hidup dan keseimbangan hidup manusia dan alam.

Sedangkan keserakahan pemerintah dalam mengeksploitasi kekayaan alam sebuah negara dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Minimata, Jepang, pertikaian antara Rusia, Kanada dan Denmark dalam eksploitasi mineral di Laut Arctic, Kutub Selatan, dan deforestasi Hutan Hujan Tropis di Brazil yang menyebabkan kehancuran ekosistem dan lingkungan serta menimbulkan efek negatif kepada masyarakat seperti penyakit yang berasal dari limbah industri hingga ancaman bencana alam seperti banjir yang dapat menenggelamkan sebagian daratan di beberapa negara.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya gerakan *environmentalism* dan *green politics* di negara tersebut. Faktor tersebut seperti, kerusakan lingkungan alam, fenomena bencana alam yang semakin mengancam kehidupan masyarakat, keserakahan pemerintah yang dapat dilihat dari pelbagai aturan yang tidak mengedepankan kelestarian lingkungan, tuntutan dunia global, pengagungan terhadap sistem kapitalisme dan pembangunan ekonomi global. Dampak dari lahirnya gerakan *environmentalism* di pelbagai belahan dunia salah satunya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan lanskap sosial politik penguasa sebuah negara.

Hal ini memberi peluang kepada pelbagai lapisan masyarakat baik awam maupun profesional (akademisi, aktivis dll) untuk menyerukan perubahan pola sosial politik penguasa sehingga lebih memperhatikan lingkungan dibandingkan dengan pengejaran modal pembangunan serta pembangunan global yang marak terjadi terutama di negara-negara dunia ketiga. Dari sinilah muncul gerakan peduli lingkungan yang berorientasi kepada kebijakan politik pemerintah dan dikenal

sebagai pemikiran *green politics*, yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang stabil antara kepentingan pembangunan dengan pelestarian lingkungan.

2. PEMBAHASAN

Gerakan *Environmentalism*: Pendekatan Historis dan Teoretis

Pembicaraan mengenai lingkungan awal mulanya telah lahir dari pemikiran Thomas Malthus (1766-1834) yang menyatakan bahwa manusia pada akhirnya akan mengalami konflik tak terelakkan, dimana produksi makanan akan bertambah dalam deret hitung sedangkan populasi manusia akan bertambah dalam deret ukur (Jerald Mast, 2013: 729-730). Berdasarkan pernyataan Malthus, diprediksikan bahwa pada masa tertentu akan terjadi ledakan penduduk bumi yang tidak terkendali dan akan melampaui kemampuan pertumbuhan produksi. Hal ini mengartikan bahwa akan tercipta sebuah kelangkaan terhadap produksi (sandang, pangan dan papan) yang tidak mampu memenuhi permintaan manusia.

Pada masa selanjutnya, bidang ekonomi, sosial dan politik mulai tertantang dengan munculnya permasalahan perubahan iklim yang semakin ekstrim. Oleh karena itu, fokus kajian terhadap *environmentalism* mulai dikaji sejak tahun 1960-an dan hingga saat ini menjadi salah satu aliran utama dalam kajian sosial politik.

Gerakan "akar" *environmentalism* pada mulanya dapat dilihat pada abad ke-19 seperti pemikiran kritikus Inggris John Ruskin dan William Morris yang fokus terhadap perkembangan dan pertumbuhan industrialisasi di Inggris dan substansi dampak industrialisasi tersebut terhadap bumi. Hal ini kemudian diikuti dengan peristiwa paska Perang Dunia (PD) I yang cukup memberikan gambaran nyata terhadap kerusakan lingkungan.

Gerakan *environmentalism* mulai berkembang dengan hadirnya buku "*Silent Spring*" tahun 1962 karya Rachel Carson yang merupakan seorang ahli biologi kelautan Amerika. Dalam bukunya, Carson menuliskan tragedi yang mengerikan akibat penggunaan pestisida dan insektisida dalam meningkatkan kegiatan industri yang menyebabkan kehancuran ekosistem dan menyebabkan kematian beberapa masyarakat yang mendiami daerah disekitar pabrik tersebut. Karya Carson ini menjadi inspirasi bagi kelahiran gerakan kaum *environmentalism* yang fokus kepada persoalan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang mengganggu keseimbangan kehidupan makhluk hidup.

Meskipun karya Carson ini menjadi pro dan kontra bagi beberapa kalangan, tetapi turut menyumbangkan kesadaran bagi sebagian besar orang mengenai pentingnya gerakan *environmentalism* yang berusaha dan berupaya untuk menjaga alam dari keserakahan manusia-manusia yang hanya tunduk kepada nafsu pengejaran penguasaan ekonomi dan pembangunan yang mengabaikan keselamatan makhluk hidup terutama keselamatan insan. Salah satu pemikir besar yang terinspirasi dari karya Carson mengenai *environmentalism* ialah Arne Naess.

Naess (1929-2009) merupakan profesor dan pemikir dari Universitas Oslo sebagai ahli filosofi dan bahasa & semantik. Semenjak membaca karya Carson, Naess meninggalkan posisinya di Universitas Oslo untuk belajar etika ekologi dan permasalahan lingkungan. Naess terkenal sebagai salah seorang pakar yang mengkaji tentang "*Deep Ecology*". Pemikiran Naess mengenai lingkungan dapat dilihat dari pernyataan di bawah ini:

“the nation that the earth is not simply a resource to be used by humans. Humans should consider themselves as part of a complex, interdependent system rather than consumers of natural goods, and should develop compassion for nonhumans. To fail to understand this point was to risk destroying the natural world through narrow-minded, selfish ambition” (Sam Atkinson, 2013: 292).

Naess menyatakan bahwa manusia jangan memiliki keegoisan yang berambisi untuk menggunakan kekayaan alam sehingga menyebabkan kerusakan alami dunia. Manusia perlu menyadari bahwa bumi bukan saja sebagai sumber daya yang hanya dapat digunakan oleh manusia, tetapi manusia harus menyadari bahwa mereka (manusia) adalah kesatuan kompleks dari bumi itu sendiri.

Isu gerakan *environmentalism* turut mempengaruhi bidang kajian ekonomi. Hal ini ditandai dengan hadirnya *“Steady State Economy”* karya Herman Daly seorang ekonom ekologis pada tahun 1970. Buku ini menyatakan peran penting lingkungan yang seringkali diabaikan oleh para ekonom konvensional, dimana Daly menekankan kepada dua kepentingan lingkungan bagi kegiatan dan kajian ekonomi, yaitu lingkungan merupakan sumber daya dari semua kebutuhan materi dan energi, dan lingkungan merupakan tempat pembuangan sisa atau limbah industri yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian suatu negara.

Hal tersebut diperkuat dengan semakin berkembangnya gerakan *environmentalism* melalui karya Meadow *et al* yang berjudul *“The Limits To Growth”* pada tahun 1972. Tulisan ini mendeskripsikan perluasan kajian populasi manusia yang berkaitan dengan pertumbuhan produksi dan konsumsi yang semakin pesat dapat memberikan gambaran keterbatasan kesinambungan kegiatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan alam.

Tantangan persoalan lingkungan telah menjadi fokus kajian dunia internasional yang berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sebagai hasil dari adanya konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia pada 5-16 Juni 1972. Pertemuan ini menghasilkan prinsip-prinsip dan rekomendasi yang sangat bernilai bagi perkembangan kajian lingkungan (Moh. Hatta, 2010: 156-157). Peran serta PBB dalam menanggapi isu lingkungan, memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan cita-cita gerakan *environmentalism*.

Konferensi di Stockholm muncul dilatarbelakangi oleh perhatian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB terkait masalah lingkungan hidup yang turut mempengaruhi pembangunan. Persiapan konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia ini dikoordinir oleh Maurice F. Strong sebagai ketua panitia konferensi tersebut. Terdapat enam agenda yang dirancang dalam acara ini, yaitu (1) perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup; (2) segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam; (3) identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh internasional secara luas; (4) segi-segi pendidikan, penerangan, sosial, dan kebudayaan dalam masalah-masalah lingkungan hidup; (5) pembangunan dan lingkungan hidup; dan (6) implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-tindakan yang diusulkan dalam konferensi (Moh. Hatta, 2010: 160-161).

Keenam agenda tersebut menjadi fokus pembahasan dalam konferensi di Stockholm tersebut. Konferensi yang berlangsung selama 12 hari yang diikuti oleh

113 negara dan beberapa aktivis peninjau ini menghasilkan beberapa keputusan penting yang diumumkan pada akhir sidang, 17 Juni 1972. Hasil keputusan sidang di Stockholm antara lain, (1) deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia; (2) Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia; dan (3) Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut (Moh. Hatta, 2010: 161-162). Berdasarkan konferensi di Stockholm tersebut, perjuangan kaum *environmentalism* di pelbagai penjuru dunia mulai mendapatkan pengakuan untuk melaksanakan cita-cita mereka berdasarkan pengakuan dan legalitas yang telah wujud berdasarkan hasil Konferensi Lingkungan Hidup Manusia tersebut.

Semakin maraknya perkembangan isu lingkungan secara global setelah konferensi di Stockholm, PBB kemudian mendirikan *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1983 yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland. Komisi ini hadir untuk menjawab tantangan isu lingkungan dan pembahasan pembangunan berkelanjutan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan kerusakan lingkungan seperti degradasi dan keberlangsungan hidup ekologis yang seimbang antar pelbagai aspek (ekonomi, sosial dan politik).

Brundtland (1987) mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan masa ini tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Andrew Heywood, 2013: 242). Pembangunan berkelanjutan dinilai sebagai alternatif yang bijak bagi pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat global di masa yang akan datang dan alternatif ini disetujui oleh sebagian besar pemimpin dunia saat itu.

WCED berkedudukan di Geneva yang dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Brundtland (Norwegia) dan Dr. Mansour Khalid (Sudan) dan terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari beberapa negara dunia seperti Zimbabwe, Jerman Barat, Jepang, Indonesia dll. Sebagai sebuah komisi internasional, WCED memiliki beberapa tugas pokok, yaitu mengajukan strategi jangka panjang pengembangan pembangunan berkelanjutan, mengajukan cara-cara kerjasama antarnegara terkait permasalahan lingkungan, mengajukan cara-cara penanggulangan wawasan pembangunan lingkungan dan mengajukan cara-cara penanggulangan agenda aksi dalam pembangunan.

Enam pendekatan yang terdapat dalam WCED untuk mengkaji permasalahan lingkungan yaitu, keterkaitan, keberlanjutan, pemerataan, keselamatan dan risiko lingkungan, pendidikan dan komunikasi, dan kerja sama internasional. Selain itu WCED juga mengeluarkan publikasi dokumen "*Our Common Future*" yang menjelaskan pembangunan berkelanjutan sebagai kegiatan ekonomi politik yang harus memenuhi kriteria keadilan intragenerasi dan antargenerasi dan kewajiban global untuk mengatasi krisis persoalan lingkungan dan kemiskinan.

PBB selanjutnya melaksanakan KTT BUMI di Rio de Jenairo pada 3-14 Juni 1992 sebagai peringatan ke-20 konferensi Stockholm 1972, dalam KTT ini digunakan laporan dari WCED sebagai pedoman dalam pelaksanaan agenda acara. Konferensi Bumi ini dinamakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) dan dihadiri oleh 177 kepala negara, wakil pemerintahan, dan perwakilan

badan-badan di lingkungan PBB. Konferensi ini menggambarkan dukungan nyata dari seluruh pemimpin dunia terhadap proses pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan nasional dan internasional.

Keputusan penting dari UNCED ialah konsensus mengenai beberapa bidang penting yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan perjanjian, salah satu keputusan penting yang lahir dari UNCED adalah dikeluarkannya *The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development* yang terdiri dari 27 prinsip fundamental mengenai lingkungan dan pembangunan. Konferensi ini juga turut menghasilkan kaitan erat antara pembangunan dan perlindungan lingkungan serta semangat Rio yang terdiri dari dimensi intelektual, ekonomi dan politik sebagai pedoman baru dalam menegakkan kelestarian lingkungan hidup. Melalui pelbagai kegiatan lembaga-lembaga dunia seperti yang telah dijelaskan tersebut, isu *environmentalism* menjadi sebuah agenda penting dalam abad ini.

Kajian *environmentalism* pada awalnya lahir sebagai tanggapan terhadap krisis lingkungan secara global. Krisis lingkungan global ini akan memberi dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi terutama manusia. Oleh karena itu, isu *environment* bukan hanya menjadi isu nasional tetapi juga telah menjadi isu internasional yang dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perubahan kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Fokus perhatian gerakan *environmentalism* ialah mengenai beberapa isu kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim, menipisnya lapisan ozon, pencemaran air dan udara, kepunahan spesies hewan dan tumbuhan, kebakaran hutan, pencemaran selokan, sungai dan laut oleh sampah, ancaman pabrik industri kimia, kepadatan penduduk, rekayasa genetika pada produk makanan, dll. Fokus utama gerakan *environmentalism* tersebut muncul disebabkan oleh pelbagai ulah manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan yang dilatarbelakangi oleh gaya *over-consumption*, gaya hidup yang tidak berlandaskan prinsip *sustainable*, dan model pembangunan yang tidak sehat yang mengabaikan lingkungan sekitar.

Munculnya kerusakan lingkungan di pelbagai negara pada dasarnya disebabkan oleh pola pikir sebagian masyarakat, terutama pemimpin negara yang memandang pentingnya kemajuan industri sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan sebuah negara yang mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan. Pandangan kepada pentingnya kemajuan pembangunan dan industri sebuah negara dianggap sangat penting dalam kegiatan ekonomi global dewasa ini dengan jalan mengorbankan kelestarian lingkungan hidup demi mencapai "*economic growth*" dan pemujaan yang sangat ekstrim terhadap sistem *capitalism* dan *neo-liberalism* sebagai tonggak ekonomi sebuah negara.

Para teoretikus hijau berargumen bukan hanya terdapat obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi yang membawa pengurasan dan kerusakan lingkungan alam, tetapi juga telah merusak ekosistem yang rentan yang menjadi sandaran semua kehidupan, mengancam kelestarian dari spesies manusia itu sendiri (Andrew Heywood, 2013: 243). Fokus pengejaran pertumbuhan ekonomi yang marak dilakukan oleh negara, terutama negara dunia ketiga telah menyebabkan kehancuran bagi kehidupan manusia itu sendiri selain merusak lingkungan alam

yang didasari kepada usaha untuk terus melakukan pertumbuhan ekonomi dengan jalan pembangunan.

Kaum *environmentalism* ialah seseorang atau sekelompok orang yang mendukung tujuan pelbagai gerakan lingkungan hidup, dari sudut pandang politik mereka dikenal sebagai "green" atau "kaum hijau". Kaum *environmentalism* terdiri dari aktivis, relawan, akademisi dan profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta memiliki pandangan yang kuat terhadap isu lingkungan.

Kaum *environmentalism* sering disamakan dengan gerakan konservasionis, yaitu kelompok yang berjuang melakukan pelestarian, restorasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kaum *environmental* yang radikal sering dilabelkan sebagai *Eco Terrorism* yang menggunakan cara-cara kekerasan, sabotase, vandalisme, perusakan properti dan intimidasi yang mengatasnamakan kaum *environmentalism* (WALHI, 2008: 67). Pada dasarnya, peran dari setiap gerakan *environment* ialah untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dengan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun seringkali para teroris ekologi (gerakan lingkungan radikal) menilai pemerintah tidak menghiraukan cara-cara persuasif sehingga mereka menggunakan jalan kekerasan untuk menyampaikan tujuan mereka.

Environmentalism merupakan gerakan sosial dan politik yang diarahkan untuk pelestarian, restorasi dan peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan publik, advokasi perubahan gaya hidup, perbaikan perencanaan komunitas, perubahan ekonomi uang dan perombakan kebijakan negara (WALHI, 2008: 69). *Environmentalism* dikatakan sebagai gerakan sosial karena gerakan ini fokus terhadap persoalan-persoalan sosial yang melibatkan makhluk hidup terutama manusia, sedangkan dikatakan sebagai gerakan politik disebabkan karena gerakan ini berusaha menyelesaikan isu lingkungan melalui pelbagai kebijakan pemerintah.

Paham kesadaran *environmentalism* menempatkan kesehatan, harmoni dan integritas dari lingkungan alamiah sebagai pusat perhatian dan kepedulian manusia. Perbaikan kualitas lingkungan dilakukan melalui preservasi, restorasi atau perbaikan sumber daya alam melalui manajemen sumber daya alam berkelanjutan dan melindungi sumber daya alam dengan jalan kebijakan publik serta mendorong perubahan perilaku dan sudut pandang manusia (John Situmeang, tth). Tahapan dalam menciptakan kesadaran akan gerakan *environment* memerlukan kerjasama yang kuat antara masyarakat awam dengan pemerintah, hal ini dilakukan untuk menciptakan sinergi antara hak untuk menyampaikan aspirasi (isu lingkungan) rakyat dengan kewajiban berupa pemberian perlindungan terhadap hak rakyat tersebut (kebijakan/peraturan) oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap sudut pandang dan perilaku manusia yang menjadikan sumber daya alam hanya sebagai alat untuk mempertahankan kehidupan manusia yang digunakan secara serakah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa kesadaran penggunaan sumber daya alam secara arif dan bijak. Manusia seharusnya mampu berfikir dan bertindak untuk mempertahankan dan menjaga lingkungan hidup agar tetap seimbang dengan kebutuhan manusia serta menghargai keberagaman sumber daya alam sebagai sebuah rahmat bagi kehidupan orang banyak dan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan *environmentalism* menekankan kepada dua formulasi, yaitu keberlanjutan (*sustainability*) dan pertanggungjawaban (*accountability of resource*). Keberlanjutan berarti memberikan konsekuensi bahwa manusia menggunakan sumber daya tidak boleh lebih dari jumlah yang dapat diregenerasikan (tumbuh-lanjut), sedangkan pertanggungjawaban memiliki arti bahwa setiap individu maupun kelompok harus mengakui diri sebagai bagian dari jaringan sosial (*network society*) yang lebih luas dan mempunyai tanggung jawab kepada seluruh jaringan (John Situmeang, tth). Formulasi keberlanjutan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan *environmentalism* menjadi dasar dalam penggunaan sumber daya alam yang menekankan kepada kelestarian lingkungan serta meminimalisir dampak kerusakan lingkungan.

Prinsip *environmentalism* menurut Lester Milbrath *et all* (1986) terdiri dari, (1) memberi nilai tinggi untuk alam; (2) memiliki rasa simpati terhadap orang lain, generasi berikutnya dan terhadap *species*; (3) memberi penekanan yang lebih besar atas kepuasan pekerja; (4) keterbatasan pertumbuhan; (5) merupakan paradigma sosial baru; (6) penghargaan yang lebih besar terhadap peranan partisipasi, hidup sederhana dan kerjasama; (7) lebih menghargai solusi publik atas pelbagai isu dibandingkan solusi pribadi; dan (8) perencanaan yang jelas guna menghindari timbulnya teknologi yang sensitif terhadap lingkungan (John Situmeang, tth). Penerapan prinsip *environmentalism* dapat membantu individu maupun kelompok untuk lebih arif dalam menggunakan sumber daya alam serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan segala kebijakan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup.

Garret Hardin (1968) dalam essay "*The Tragedy of the Common*" menggunakan metafora "*setting pastoral*" untuk menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya akan berusaha memaksimalkan kepentingan dirinya dengan cara mengeksploitasi segala hal sampai ke titik di mana ekologi akan hancur (Jerald Mast, 2013:727). Oleh sebab itu, gerakan *environmentalism* terus berkembang dan menjadi fokus kajian penting dalam pelbagai bidang ilmu seperti politik, yang menggunakan ideologi *environmentalism* sebagai acuan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan negara yang berlandaskan kepada kepentingan kolektif masyarakat sebuah negara dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan ekonomi.

Robert Paehlke (1989) menyatakan bahwa *environmentalism* telah berkembang ke titik di mana ia berfungsi seperti ideologi progresif tersendiri dengan preferensi ke pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, demokratis, dan partisipatoris (Jerald Mast, 2013:729). Berdasarkan hal tersebut, maka pemikiran gerakan *environmentalism* turut menyumbangkan pemikiran baru kepada kajian sosial politik yang kemudian dikenal dengan istilah *green politics*.

Hubungan Antara Gerakan *Environmentalism* dan *Green Politics*

Green political Theory (GPT) atau teori politik hijau/teori politik lingkungan/teori ekologis berbeda dengan teori *environmentalism*. Ernst Haeckel (1873) membedakan antara *environmentalism* dan *green politics* (GP). Menurut Haeckel, *environmentalism* berkenaan dengan perlindungan alam yang sepenuhnya untuk kegunaan umat manusia, sedangkan *green politics* mengimplikasikan pengadopsian sebuah perspektif geosentrisme (paham yang menyatakan bumi

sebagai pusat alam semesta) (Andrew Heywood, 2013: 87). Berdasarkan pandangan Haeckel, *environmentalism* memandang kepentingan lingkungan hidup untuk sepenuhnya kepentingan umat manusia, sedangkan *green politics* memandang manusia sebagai bagian dari alam (ekosentrisme) oleh sebab itu manusia harus menjaga lingkungannya.

Environmentalism berbeda dengan *green politics* yaitu berdasarkan orientasi demokratis secara sadar diri (John Barry & Andrew Dobson, 2012: 428). Dari sudut pandang demokrasi menurut Payne (1995), *environmentalism* berifat kondusif yaitu demokrasi lebih sedikit kemungkinannya untuk membahayakan lingkungan dan lebih siap melakukan tindakan untuk melindungi lingkungan (Jerald Mast, 2013: 729). Sedangkan perspektif demokrasi dalam GP berhasil dibuktikan melalui pemilu yang diikuti oleh partai-partai hijau secara terbuka, transparan, dan demokratis yang wujud dalam sistem *electoral* modern (John Barry & Andrew Dobson, 2012: 428).

Mathew Patterson (1996) juga turut membedakan *environmentalism* dan GP. *Environmentalism* menerima kerangka kerja yang eksis dalam realitas politik, sosial, ekonomi, serta struktur normatif yang ada dalam dunia politik, selain itu, gerakan ini mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang sudah ada. Sedangkan GP menganggap bahwa struktur-struktur yang sudah ada tersebut justru menjadi dasar utama munculnya krisis lingkungan sehingga struktur ekonomi, sosial dan politik memerlukan perubahan dan perhatian yang lebih utama (Apriwan, 2011: 41).

Berdasarkan pandangan mengenai perbedaan antara *environmentalism* dan GP dapat dipahami bahwa kedua-duanya merupakan paham yang berlainan, oleh sebab itu dapat dikatakan dengan perkembangan isu yang dibawa oleh gerakan *environmentalism* telah menyumbangkan pemikiran yang besar kepada lahirnya gerakan GP masa kini. Pembahasan terkait isu lingkungan tidak terlepas dari pola kebijakan pemerintah dalam pelbagai bidang terutama dalam bidang pembangunan dan ekonomi.

Perkembangan isu lingkungan oleh gerakan *environmentalism* telah menyebar ke dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Kemunculan isu lingkungan yang semakin kompleks turut mempengaruhi ranah politik baik dari tingkat lokal hingga internasional, hal ini kemudian dikenal dengan sebutan *Green Politics* (GP).

GP pada mulanya hanya muncul dalam kegiatan aksi-aksi yang dilakukan untuk menentang dan menanggapi pelbagai persoalan lingkungan hidup. Namun, pada tahap selanjutnya, GP mulai mencoba untuk melembagakan kepentingan mereka ke dalam partai politik sehingga dapat mempengaruhi dan menanggapi persoalan lingkungan melalui proses perumusan dan penetapan kebijakan negara.

Fenomena tersebut berkembang di negara-negara Eropa, Amerika dan beberapa negara Skandinavia. Sebagai contoh di Republik Federal Jerman yang membentuk Partai Hijau *Bundnis 90/Die Grunen*, di Amerika terdapat *Green Party United State Of America* dan di Jerman terdapat *German Greens* yang berhasil memenangkan 27 kursi di parlemen Jerman (Apriwan, 2011: 39). Keberhasilan Partai Hijau yang dipelopori oleh negara-negara besar tersebut menjadi insprasi bagi negara-negara lain terutama negara berkembang untuk turut memperhatikan isu lingkungan yang dituangkan ke dalam agenda kerja partai politik.

GP merupakan isu baru dalam kajian politik kontemporer di mana perkembangannya sudah sampai kepada kajian internasional. Menurut Tim Hayward (1996), perkembangan GPT diambil berdasarkan fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam, sehingga memiliki implikasi bagi perilaku politiknya. Berdasarkan argumen tersebut, maka teori politik harus selaras dengan teori-teori lingkungan. Artinya, manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (seperti dalam pandangan liberalisme) atau sebagai makhluk sosial (seperti pandangan sosialisme) akan tetapi sebagai *natural beings*, dan lebih jauh sebagai *political animals* (Apriwan, 2011: 41). Keselarasan antara teori politik dengan isu lingkungan berusaha dicapai dengan munculnya kajian GPT dan GP dalam kajian teori politik kontemporer abad ini.

Konsep ekosentrisme dalam pandangan Eckersley merupakan karakteristik GPT, yaitu menentang pandangan antroposentrisme yang menganggap manusia sebagai pusat segalanya, dalam hal ini antroposentrisme memandang kepentingan materi manusia lebih penting dibandingkan dengan kelangsungan ekosistem atau lingkungan (R. Eckersley, 2004). Pandangan ekosentrisme ini dibagi kedalam dua karakter yaitu empiris dan etis.

Pandangan empiris mengklaim keterlibatan pandangan dunia bahwa semua makhluk hidup pada dasarnya terikat hubungan dengan lingkungan, sedangkan pandangan etis menilai adanya emansipasi besar dalam ekosentrisme yang mendapati hubungan erat antara lingkungan, manusia dan spesies lain selain manusia (Nur Isadah Sinamo, 2016: 5). Berdasarkan karakteristik tersebut, pengaruh yang diberikan oleh gerakan *environmentalism* dalam GP sangatlah besar, di mana penekanan terhadap hubungan antara lingkungan dan makhluk hidup menjadi kajian penting dalam GP.

Andrew Dobson (1995) membagi karakteristik GP kedalam dua fokus, pertama menolak pandangan antroposentrisme yang diungkapkan oleh R. Eckersley dan kedua memandang pentingnya batasan pertumbuhan (*limits to growth*) (Andrew Dobson, 2007: 43&53). Spretnak dan Capra (1985) menegaskan penolakan terhadap pandangan antroposentrisme sebagai berikut:

“green politics rejects the anthropocentric orientation of humanism, a philosophy which posits that humans have the ability to confront and solve the many problems we face by applying human reason and by rearranging the natural world and the interactions of men and women so that human life will prosper” (Andrew Dobson, 2007: 43).

Sedangkan karakter pembatasan pertumbuhan merupakan batasan tertentu kepada manusia dalam melakukan perkembangan dan pembangunan terutama dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan krisis besar. Oleh karena itu, Dobson (1995) memberikan argumen bahwa kemampuan teknologi yang canggih tidak akan mampu untuk mencegah dan mengendalikan kondisi tersebut, perkembangan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan bencana seperti kelangkaan sumber daya terutama pangan, sandang, dan papan, serta akan selalu ada hubungan yang berkaitan dengan pelbagai permasalahan akibat tidak adanya pembatasan pertumbuhan.

John Barry (1994) menyatakan tiga prinsip inti dari GPT, yaitu:

- (1) *A theory of distributive (intergenerational) justice,*
- (2) *A commitment to a process of democratization, and*

(3) *The achievement of ecological sustainability* (John Barry, 1994:1)

Prinsip yang dikemukakan oleh Barry merupakan salah satu dasar yang dapat digunakan untuk mengkaji mengenai GP secara lebih mendalam. Di mana setiap prinsip memberikan panduan dan asas tersendiri bagi menjelaskan fenomena GP yang berkaitan dengan isi-isu lingkungan. Dari ketiga prinsip yang ditekankan oleh Barry dapat disimpulkan bahwa GP berusaha untuk mengkaji persoalan lingkungan dan mengaitkannya dengan politik yang bersumber kepada teori distribusi, proses demokratisasi, dan keberlangsungan ekologi.

GP juga memiliki sepuluh nilai yang menjadi dasar dan tujuan gerakan sekaligus acuan bagi artikulasi kebijakan politik, yaitu:

- (1) Kesadaran dan keberlangsungan ekologi, manusia harus bertindak berdasarkan pemahaman bahwa ia merupakan bagian dari alam bukan berada di atas alam lingkungannya,
- (2) Demokrasi akar rumput, demokrasi harus dimulai dari akar rumput yaitu elemen terbawah dari sebuah struktur kehidupan di bumi ini,
- (3) Keadilan sosial dan persamaan kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap sumber daya yang berasal dari masyarakat dan lingkungannya,
- (4) Anti kekerasan, memperjuangkan proses demiliterisasi dan penghilangan senjata destruktif masal,
- (5) Desentralisasi, pengambilan keputusan harus sebisa mungkin berada pada tingkat individu dan lokal,
- (6) Ekonomi berbasis komunikasi dan berkeadilan, memandang penting penerapan suatu sistem ekonomi yang berkelanjutan,
- (7) Feminisme dan kesetaraan gender, menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan jenis kelamin dan tanggung jawab interpersonal,
- (8) Penghormatan terhadap keberagaman, penghormatan terhadap keberagaman etnis, ras, agama dan budaya,
- (9) Tanggung jawab personal dan global, pencapaian kesejahteraan hidup dengan tidak mengabaikan ekologi dan harmoni sosial,
- (10) Fokus pada masa depan dan keberlanjutan, adanya tujuan jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya (Apriwan, 2011: 47-50).

Perhatian yang besar dari GP terhadap pelbagai isu lingkungan memberikan gambaran nyata bahwa politik turut berperan serta dalam usaha melestarikan lingkungan terutama menjaga keseimbangan penggunaan sumber daya untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan melalui penerapan pelbagai prinsip dan nilai GP sebagai dasar pembentukan kebijakan ekologi. Oleh karena itu, adanya GP dinilai sebagai salah satu pemikiran yang memberikan output positif bagi perkembangan teori sosial politik kontemporer.

GP dalam hubungannya dengan gerakan *environmentalism* turut memberikan sumbangan besar bagi kebaikan bersama. Dengan adanya kesadaran akan GP, maka pemimpin dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai wadah untuk mencapai tujuan *environmentalism*. Sebagai contoh, persetujuan terhadap "Protokol Kyoto" oleh negara-negara industri maju untuk mengubah target reduksi emisi sampai 5% di bawah level 1990 untuk tahun 2008 dan 2012 (Jerald Mast, 2013: 735) merupakan langkah nyata dari peran pemerintah dalam

melakukan lobi-lobi politiknya untuk mencapai kesepakatan mengenai isu lingkungan tersebut.

Young (1997) menyatakan bahwa kombinasi fleksibilitas pembuatan aturan dan data evaluasi yang bagus akan memungkinkan negara untuk mempraktikkan manajemen adaptif, yaitu langkah korektif saat muncul kondisi baru dan meningkatkan pemahaman atas isu (Jerald Mast, 2013: 737). Dengan adanya peran negara dalam menanggapi isu lingkungan melalui GP akan menghasilkan sistem cepat tanggap apabila terdapat permasalahan baru yang terkait dengan isu lingkungan serta akan meningkatkan kualitas negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Durant, Fiorino & O'Leary (2004) menyatakan bahwa dukungan terhadap pendekatan pragmatis dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan, di mana *stakeholder* dibolehkan melakukan negosiasi atas berbagai solusi mulai dari partisipasi publik sampai penggunaan hak inventif dipandang efektif dalam mencapai hasil kesepakatan (Jerald Mast, 2013: 737). Keefektifan penyelesaian sebuah masalah akan lebih besar apabila *stakeholder* turut campur tangan didalamnya, terutama dengan jalan negosiasi persuasif yang baik bagi semua pihak, dalam hal ini kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan sumber daya.

GP seluruh dunia memegang prinsip empat pilar, yakni Ekologi (*ecological wisdom/ecological sustainability*), Keadilan Sosial (*social equality & economic justice*), demokrasi kerakyatan (*grassroots democracy*), dan tanpa kekerasan (*non violence*) (WALHI, 2008: 1993). Berdasarkan empat prinsip global GP tersebut, maka kegiatan partai hijau harus berlandaskan kepada prinsip tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia tidak terdapat partai hijau (GP), namun partai politik hanya menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam agenda politiknya.

Contoh lain dari adanya GP ialah telah dikembangkannya pelbagai macam alat kebijakan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dan sistem *cap-and-trade*, pajak karbon dan pengurangan karbon merupakan potensi yang berguna dan berperan penting dalam merespon pelbagai isu lingkungan baik ditingkat nasional maupun internasional (Jerald Mast, 2013: 737). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa GP yang dilaksanakan oleh pemimpin negara merupakan wujud nyata terhadap kepedulian mereka kepada permasalahan lingkungan hidup.

3. KESIMPULAN

Permasalahan kerusakan lingkungan dan ancaman yang membahayakan kehidupan di muka bumi ini mewujudkan kepedulian dari individu atau kelompok yang berusaha untuk mencegah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan hidup manusia yang seimbang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, gerakan *environmentalism* hadir sebagai jawaban yang mengupayakan keberlangsungan yang seimbang antara alam dan makhluk hidup didalamnya.

Keberhasilan gerakan *environmentalism* sebagai sebuah gerakan penyeimbang terhadap keserakahan kapital dan pembangunan ekonomi global telah banyak memperikan pengaruh ke dalam pelbagai bidang kehidupan terutama di bidang politik. di bidang politik, gerakan *environmentalism* telah mempengaruhi lahirnya *green politics*. GP merupakan salah satu alternatif yang efektif untuk mengukuhkan gerakan *environmentalism* melalui penggunaan kekuasaan yang

dimiliki oleh pemimpin untuk merumuskan dan menetapkan segala kebijakan yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan umat manusia.

Environmentalism dan *green politics* sama-sama memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan alam dan manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, kehadiran *environmentalism* dan *green politics* memberikan dampak yang cukup baik terhadap perkembangan perbaikan berbagai permasalahan lingkungan yang dewasa ini semakin kompleks.

4. REFERENSI

- Apriwan. 2011. *Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional*. Multiversa: Journal.
- Atkinson, Sam (edt). 2013. *The Politics Book*. New York: DK Publishing.
- Barry, John. 1994. *Green Political Theory and The State*. Glasgow University: Journal.
- Barry, John & Andrew Dobson. Dalam Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas (edt). 2012. *Handbook Teori Politik*. Bandung: Nusa Media (413-440).
- Dobson, Andrew. 2007. *Green Political Thought*. New York.
- Eckersley, R. 2004. *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge MA: MIT Press.
- Heywood, Andrew. 2013. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Situmeang. tth. *Economic, Social, and Environmental Policies as Drivers of Green Job*.
- Mast, Jerald. Dalam John T. Ishiyama & Marijke Breuning (edt). 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: Kencana (726-740).
- Moh. Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakkan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Isadah Sinamo. 2016. *Keterlibatan World Wildlife Fund For Nature (WWF) Dalam Upaya Konservasi Harimau Sumatera di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Provinsi Riau Tahun 2010-2014*. Universitas Riau: Jurnal.
- WALHI. 2008. *Menjadi Environmentalis itu Gampang: Sebuah Panduan bagi Pemula*. Jakarta Selatan.